

DAFTAR PUSTAKA

I. Referensi Buku-Buku

- Adam, Rainer, *et al.*, 2006, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta.
- Alamsyah, T.M. Taufik Alamsyah, “Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik”, *Juristek*, Vol. 2, No. 1, Juli, 2013.
- Anggraini, A.M. Tri, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.
- _____, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Assidiqie, Jimly, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Bentham, Jeremy, 2000, *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation: Jeremy Bentham 1781*, Batoche Books, Kanada.
- Bisariyadi, *et.al.*, 2016, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Laporan Hasil Penelitian, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, 6th. ed., West Publishing Co. St. Paul – Minn, USA.
- Bork, Robert H., 1978, *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*, Basic Books, Inc., New York.
- Fuady, Munir, 2000, *Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Groshinski, Katrina dan Caitlin Davies, 2015, *Competition Law in Asia Pacific: A Practical Guide*, Kluwer Law International, Netherlands.
- Hamzah, Andi, 2011, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hansen, Knud, 2002, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis Publising Media Services, Jakarta.

- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Hart, H.L.A., 1972, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Juwana, Hikmahanto, et.al., 2003, *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership for Business Competition (PBC), Jakarta.
- Khemani, R. Shyam, et.al., 1993, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, Organisation For Economic Co-Operation and Development (OECD), tanpa tempat penerbitan.
- _____ dan D.M. Shapiro, 1996, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris.
- _____, et. al., 1999, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, Washington DC. and Paris: The World Bank and Organization for Economic Co- operation and Development, Washington.
- Lubis, Andi Fahmi, et al., 2017, *Hukum Persaingan Usaha* (Ed. 2), Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Motta, Massimo, 2007, *Competition Policy: Theory and Practice*, Cambridge University Press, New York.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhlizi, Arfan Faiz, “Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi”, *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 1, April 2012.

Posner, Richard A., 1983, *The Economics of Justice*, Harvard University Press, United States of America.

Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raz, Joseph, 1980, *The Concept of a Legal System, An Introduction to The Theory of Legal System*, Second Edition, Clarendon Press, Oxford.

Shea, Emiliano dan Maria José, 2015, *Fighting Bid Rigging in Public Procurement in Mexico: A Secretariat Analytical Report on Compliance with OECD Standards of Procurement Legislation, Regulation and Practices in CFE*, OECD, Mexico.

Simorangkir, JCT, *et.al.*, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sirait, Ningrum Natasya, 2003, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

_____, *et.al.*, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform (NLRP), Jakarta.

_____, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soeroso, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, H. dan R. Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supomo, R., 1982, *Sejarah Politik Hukum Adat Dari Zaman Kompeni Hingga Tahun 1848*, Jilid I Pradnya Paramita, Jakarta.

Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wantu, Fence M., “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 10/KPPU-I/2015 perihal Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 22 April 2016.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 12/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Badan Usaha secara Pelelangan Umum dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha tanggal 7 Juni 2016.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 02/KPPU-I/2016 perihal Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia, 21 November 2017.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 September 2017.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 perihal Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 perihal Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016 perihal Pedoman Penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3655).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3741).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5334).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3274).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3316).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3587).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3611).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3681).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3817).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4316).

III. Sumber Lain

Freshfields Bruckhaus Deringer, “Who We Are: The World’s Biggest International Organization Rely on Us to Help Them Make the Right Decision in A Fast Changing World”, <https://www.freshfields.com/en-gb/about-us/who-we-are/>, diakses 24 Maret 2018.

Heriani, Fitri Novia, “KPPU Apresiasi Putusan MK Soal Uji Materi UU Persaingan Usaha”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c50b6797c24/kppu-apresiasi-putusan-mk-soal-uji-materi-uu-persaingan-usaha>, diakses 10 Maret 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/proposisi>, diakses 25 Maret 2017.

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2005, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 perihal Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU-RI, Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Jurnal Persaingan Usaha”, http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_4_2010_ok.pdf, diakses 23 Maret 2018.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU Rintis Kerjasama Penyusunan Regulasi Daerah dengan Pemkot Denpasar”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2013/01/kppu-rintis-kerjasama-penyusunan-regulasi-daerah-dengan-pemkot-denpasar/>, diakses 26 Maret 2018.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU Audiensi dengan Pemprovsu”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/04/kppu-audiensi-dengan/>, diakses 26 Maret 2018.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dukung Percepatan MOU dengan KPPU”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/01/pemerintah-provinsi-jawa-timur-dukung-percepatan-mou-dengan-kppu/>, diakses 26 Maret 2018.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “KPPU KPD Balikpapan Jalin Kerjasama dengan Pemkab Berau”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2015/08/kppu-kpd-balikpapan-jalin-kerjasama-dengan-pemkab-berau/>, diakses 26 Maret 2018.

Nita, “Pemprov Jalin Kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI”, <http://www.babelprov.go.id/content/pemprov-jalin-kerjasama-dengan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-kppu-ri?qt-berita=2>, diakses 26 Maret 2018.

Pujianto, Rommy, “KPK-KPPU Sepakat Kerjasama Pencegahan Korupsi di Dunia Usaha”, <http://m.metrotvnews.com/news/hukum/4KZexVgk-kpk-kppu-sepakat-kerja-sama-pencegahan-korupsi-di-dunia-usaha>, diakses 28 Maret 2018.

Rauf, Muhammad Sarkawi, “Indonesia: Focusing on Cartels and Bid Rigging”, https://www.freshfields.com/globalassets/our-thinking/campaigns/antitrust-in-asia/06304_pg_act_asia-guide_aw_interactive_v3.pdf, diakses 11 Februari 2018.

Sukoco, Manik, “Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah”, https://www.kompasiana.com/maniksukoco/tentang-pembangunan-pembangkit-listrik-tenaga-sampah_58cf26e46ea83429048b456b, diakses tanggal 17 Februari 2018.